

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE AUDIT**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**RIYANTINI AMALIA PARAMITHA**  
**NIM. C2C009002**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2013**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Riyantini Amalia Paramitha  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009002  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE  
AUDIT**  
Dosen Pembimbing : Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt

Semarang, 28 Mei 2013

Dosen Pembimbing,

(Shiddiq Nur Rahardjo, SE., M.Si., Akt)

NIP. 197205112000121001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama : Riyantini Amalia Paramitha  
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009002  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE  
AUDIT**

Telah Dinyatakan lulus pada tanggal 30 Mei 2013.

### Tim Penguji

1. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E.,M.Si.,Akt. (.....)
2. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Riyantini Amalia Paramitha, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE AUDIT**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Mei 2013

Yang membuat pernyataan,

(Riyantini Amalia Paramitha)

NIM. C2C009002

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Suka cita terletak pada perjuangan, usaha, termasuk dalam penderitaan, bukan pada kemerdekaan itu sendiri.

-Mahatma Gandhi-

Kekuatan tidak berasal dari kapasitas fisik. Kekuatan berasal dari kemauan yang gigih.

-Mahatma Gandhi-

Jangan pernah iri dengan yang orang lain miliki. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Bersyukurlah untuk hidup ini.

-Anonymous-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:  
Almarhum Bapak dan Almarhumah Ibu

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the factors influencing the audit committee quality. The analysis used independent variable of board of commissioner characteristics, the existence of a big four auditor, managerial ownership, company size, and the company's leverage. The dependent variable is audit committee quality.*

*The sample used is secondary data from the Indonesia Stock Exchange (BEI) is a company's annual report in 2011. Samples were taken at random from the 356 non-financial companies. Seventy-eight non-financial companies designated as the calculation formula Babbie. Variable characteristics of the board of commissioners, the presence of big four accounting firm, managerial ownership, firm size and leverage were analyzed using multiple linear regression, with hypothesis testing of statistic *t* and statistic *F*.*

*The results of this research indicate that leverage is significantly positive influence the quality of the audit committee. While the characteristics of the board of commissioners, the presence of big four accounting firm, managerial ownership and firm size does not have a significant influence on the quality of the audit committee.*

*Keywords: agency theory, audit committees, good corporate governance, board of commissioner*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas komite audit pada perusahaan non keuangan di Indonesia. Analisis ini menggunakan variabel independen yaitu, karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP *big four*, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*. Variabel dependen adalah kualitas komite audit.

Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berupa laporan tahunan perusahaan pada tahun 2011. Sampel diambil secara acak dari 356 perusahaan non keuangan. Tujuh puluh delapan perusahaan non keuangan ditetapkan sebagai sampel melalui perhitungan formula babbie. Variabel karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP *big four*, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* dianalisis menggunakan metode analisis Regresi Linear Berganda dengan pengujian hipotesis uji statistik t dan uji statistik F.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas komite audit. Sedangkan karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP *big four*, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas komite audit.

Kata Kunci: teori agensi, komite audit, *good corporate governance*, dewan komisaris

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya skripsi dengan judul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS KOMITE AUDIT** dapat terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Shiddiq Nur Rahardjo, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Purbayu Budi Santosa, M.S. selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa FEB Undip.
3. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. Dr. Muchammad Syafruddin, M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan dukungan selama penulis kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, terutama untuk:

1. Almarhum bapak dan almarhumah ibu (MW Ridhowi dan Yatini) tersayang yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan pengorbanan tanpa mengenal waktu. Semoga Allah SWT menyayangi, melindungi dan memberikan tempat terbaik. Aku sayang kalian.
2. Ibu Sri Hartuti yang selalu menemani, menjaga dan mendukungku menggantikan bapak dan ibu.
3. Adikku Riski Putra Pratama, terima kasih atas dukungan, doa dan canda tawa selama ini.
4. Sahabat kecilku Icong dan Alef, yang selalu memberi dukungan, semangat dan mendengarkan keluh kesahku.
5. Butir (Lia), Bude (Gea), Nia, Ayu, Mala, Nisa dan Wulan terima kasih atas dukungan, doa dan kebersamaan selama ini. Berkat kalian aku tak kesepian. Terima kasih sudah menjadi keluarga kedua.
6. Puti yang mau menemaniku ke sana kemari menggila bersama.

7. Teman-teman Chacha, Saras, Ida, Kiki, Monic, Siska, Tami terima kasih sudah berbagi cerita, ilmu dan pengalaman.
8. Teman-teman KKN Desa Karang Sari, Mbak Karin, Mbak Agni, Andri, Mas Ricky dan Mas Rifky.
9. Kepada pihak-pihak lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan sebagai masukan yang berharga. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terkait.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Mei 2013

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12

2.1.1	Teori Agensi.....	12
2.1.2	Good Corporate Governance.....	14
2.1.3	Komite Audit.....	17
2.1.4	Karakteristik Dewan Komisaris.....	20
2.1.5	Keberadaan <i>Big Four</i> .....	23
2.1.6	Kepemilikan Manajerial.....	23
2.1.7	Ukuran Perusahaan.....	24
2.1.8	Leverage.....	24
2.2	Penelitian Terdahulu.....	24
2.3	Kerangka Pemikiran.....	26
2.4	Hipotesis.....	27
2.4.1	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit.....	27
2.4.2	Pengaruh Keberadaan Big Four terhadap Kualitas Komite Audit.....	28
2.4.3	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Komite Audit.....	28
2.4.4	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Komite Audit.....	29
2.4.5	Pengaruh Leverage terhadap Kualitas Komite Audit.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....		31
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	31
3.1.1	Variabel Dependen.....	31

3.1.2	Variabel Independen.....	35
3.2	Populasi dan Sampel.....	40
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.5	Metode Analisis.....	42
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	42
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	42
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	42
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas.....	43
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	43
3.5.3	Uji Hipotesis.....	44
3.5.3.1	Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	45
3.5.3.2	Uji Statistik F.....	46
3.5.3.3	Uji Statistik T.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		47
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	47
4.2	Hasil Analisis Data.....	48
4.2.1.	Statistik Deskriptif.....	48
4.2.2.	Pengujian Asumsi Klasik.....	50
4.2.3.	Analisis Regresi Linier.....	54
4.2.3.1.	Uji Model.....	54
4.2.3.2.	Koefisien Determinasi.....	55
4.2.3.3.	Pengujian Hipotesis.....	56

4.3 Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Keterbatasan.....	64
5.3 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif.....	62
Tabel 4.2 Uji Normalitas.....	65
Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	66
Tabel 4.4 Pengujian Multikolinearitas dengan VIF.....	68
Tabel 4.5 Uji F Model Regresi.....	69
Tabel 4.6 Hasil Koefisien Determinasi.....	70
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	71

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Output SPSS.....	82
Lampiran 2 Hasil Tabulasi Data.....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Saat ini komite audit telah menjadi bagian dari tata kelola organisasi perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Bahkan keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan telah diatur secara legal hampir di seluruh negara. Peraturan mengenai keberadaan komite audit diterapkan sebagai respon atas kasus kebangkrutan yang melanda perusahaan karena ketidakefektifan mereka dalam menerapkan tata kelola organisasi perusahaan yang baik. Salah satu contohnya, dijelaskan oleh Solomon (dalam Baxter, 2010) bahwa kasus yang melanda *Enron* dilatarbelakangi oleh lemahnya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang, yakni terdapat konflik kepentingan diantara manajer yang mengakibatkan komite audit gagal untuk menjalankan fungsinya dalam hal pengendalian internal dan mengontrol audit eksternal.

Keberadaan komite audit merupakan komponen yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia, keberadaan komite audit dipertegas dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 tentang *Pembentukan Komite Audit bagi BUMN*, Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004 tentang *Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit* dan Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara*, serta Surat Edaran BAPEPAM Nomor 03 Tahun 2002 (untuk perusahaan terbuka).

Menurut Peraturan Nomor: IX.I.5 (lampiran Kep-29/PM/2004), dijelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Sedangkan secara tersirat, pengertian komite audit menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002 adalah suatu badan di bawah dewan komisaris, sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota yang bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun pelaporannya dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit merupakan salah satu unsur *Good Corporate Governance (GCG)* yang bertugas dan bertanggung jawab:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- c. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee* untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- e. Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.

- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, serta manajemen risiko emiten dan perusahaan publik.
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan.
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit memiliki wewenang untuk:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan dan pihak yang menjalankan fungsi internal dan eksternal audit serta manajemen risiko.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota komite audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Di Indonesia, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris. Sehingga, baik buruknya kinerja atau kualitas komite audit mungkin juga dipengaruhi oleh karakteristik dewan komisaris. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* mengemukakan bahwa komite audit memiliki tujuan untuk membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawab dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh atas berjalannya aktivitas perusahaan. Semakin

baik karakteristik yang dimiliki oleh dewan komisaris, mengindikasikan semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki komite audit.

Keberadaan auditor eksternal juga diprediksi dapat mempengaruhi kualitas komite audit. Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* biasanya telah menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Alasannya, KAP *Big Four* merupakan auditor eksternal yang memiliki reputasi baik dimata para kliennya. Untuk itu, potensi terjadinya kecurangan dalam proses audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* semakin rendah. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap perilaku perusahaan klien. Mereka akan terdorong untuk melaksanakan pelaporan keuangan secara transparan, sesuai dengan karakteristik tata kelola perusahaan yang baik.

Kepemilikan manajerial juga berpotensi mempengaruhi kualitas komite audit suatu perusahaan. Jensen and Meckling (1976) menegaskan bahwa kenaikan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer pemilik saham dengan pemilik saham lainnya. Teori agensi memprediksi bahwa dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka akan menurunkan permintaan monitoring oleh komite audit (Beasley and Salterio, 2001).

Ukuran perusahaan juga berpotensi mempengaruhi kualitas komite audit. Menurut Fama-Jensen (dalam Anisa, 2012) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menimbulkan *agency-cost* yang semakin tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula kebutuhan dalam hal monitoring. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kualitas komite audit yang

ada di dalamnya, mengingat komite audit merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lain (*good corporate governance*).

Tingkat *leverage* perusahaan juga diprediksi dapat mempengaruhi kualitas komite audit. Semakin tinggi *leverage* perusahaan, menggambarkan semakin tinggi pembiayaan yang berasal dari utang. Keadaan seperti ini akan dapat menurunkan kepercayaan *stakeholders*, karena manajer dari perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kecenderungan untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Sehingga untuk mengembalikan kepercayaan *stakeholders*, perusahaan perlu membentuk suatu badan independen yang dapat menjamin bahwa proses monitoring dalam perusahaan telah berjalan dengan baik (Baxter, 2010).

Kualitas komite audit sendiri dapat diproksikan dengan karakteristik komite audit yang meliputi independensi, kompetensi akuntansi/keuangan, aktivitas komite audit dan ukuran komite audit. Keempat indikator tersebut dapat mewakili komponen-komponen yang berada dalam komite audit guna menggambarkan kualitas yang dimiliki oleh suatu komite audit perusahaan. Independensi komite audit berhubungan dengan seberapa besar keterlibatan anggota komite audit dengan aktivitas perusahaan. Kompetensi akuntansi dan keuangan berhubungan dengan pengetahuan akuntansi, keuangan dan audit serta pengalaman tentang tata kelola perusahaan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Aktivitas komite audit berhubungan dengan frekuensi pertemuan komite audit dalam satu tahun. Sedangkan ukuran komite audit, diukur melalui jumlah anggota komite audit.

Penelitian terdahulu terkait komite audit masih sangat terbatas. Baxter (2010) menyebutkan penelitian terdahulu mengenai kualitas komite audit yang dinilai melalui proksi karakteristik komite audit itu sendiri antara lain: penelitian Menon and Williams (1994) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara proporsi direktur independen dan frekuensi pertemuan komite audit; Deli and Gillan (2000) menemukan bahwa independensi dan kualitas komite audit memiliki hubungan yang negatif dengan pertumbuhan perusahaan dan kepemilikan manajerial namun berhubungan secara positif dengan ukuran perusahaan dan *leverage*; Klein (2002) menemukan bahwa independensi komite audit berhubungan secara positif dengan independensi dan ukuran dewan direksi, namun berhubungan secara negatif dengan pertumbuhan perusahaan serta pelaporan kerugian perusahaan berturut-turut; Cotter and Silvester (2003) menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara komite audit dan independensi dewan direksi. Semakin tinggi independensi komite audit, mengakibatkan berkurangnya pengawasan oleh *debtholder* ketika *leverage* perusahaan rendah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Baxter (2010) yang melakukan penelitian pada perusahaan non keuangan di Australia. Penelitian tersebut meneliti pengaruh karakteristik dewan direksi, *leverage*, keberadaan KAP *Big Five*, dan juga kepemilikan manajerial terhadap kualitas komite audit. Hasil temuannya menyatakan bahwa karakteristik dewan direksi mempengaruhi kualitas komite audit didalamnya. Namun sebaliknya, tidak ditemukan pengaruh dari

*leverage*, keberadaan KAP *Big Five*, dan kepemilikan manajerial terhadap kualitas komite audit pada perusahaan-perusahaan non keuangan di Australia.

Pada penelitian ini ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel independen. Ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel independen, karena ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi kebutuhan akan dewan komite audit yang efektif bagi perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kompleks pula kegiatan operasional perusahaan. Sehingga, diperlukan kegiatan monitoring yang semakin berkualitas baik oleh. Karakteristik dewan direksi digantikan dengan karakteristik dewan komisaris, mengingat di Indonesia menganut *two-tier system* dimana fungsi pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti menganggap bahwa masih perlu diadakan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit. Atas dasar tersebut, judul penelitian yang akan diajukan adalah “ **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Komite Audit**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali apakah beberapa indikator kualitas komite audit berhubungan dengan sejumlah faktor seperti karakteristik dewan komisaris, keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*. Hal ini perlu dilakukan, mengingat penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit di Indonesia masih sangat terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Apakah karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas komite audit?
- b. Apakah keberadaan KAP *Big Four* berpengaruh terhadap kualitas komite audit?
- c. Apakah kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi kualitas komite audit?
- d. Apakah ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kualitas komite audit?
- e. Apakah leverage perusahaan dapat mempengaruhi kualitas komite audit?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain untuk :

- a. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas komite audit.
- b. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh keberadaan KAP *Big Four* terhadap kualitas komite audit.
- c. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas komite audit.
- d. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas komite audit.

- e. Menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *leverage* perusahaan terhadap kualitas komite audit.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan penelitian tersebut. Kegunaan dari penelitian ini antara lain :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca, berguna sebagai bahan diskusi, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Bagi regulator, sebagai wacana mengenai pentingnya pengawasan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh komite audit.
2. Bagi manajemen, sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya keberadaan komite audit guna menjamin terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik.
3. Bagi investor, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami dan menilai baik-buruknya tata kelola perusahaan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian ini akan disajikan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi mengenai penjelasan mengenai variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS**

Berisi penjelasan setelah penelitian dilakukan yang mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data beserta interpretasi hasilnya.

**BAB V : PENUTUP**

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi, implikasi dan keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian yang akan datang.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang mendasari praktik dunia bisnis. Teori ini menjelaskan hubungan kerja antara prinsipal dan agen. Prinsipal adalah pihak yang memberi wewenang sedangkan agen merupakan pihak yang menerima wewenang dalam bentuk sebuah kontrak kerjasama. Dalam teori ini dijelaskan bahwa baik prinsipal maupun agen, masing-masing memiliki motif pribadi. Prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan kepada agen. Bagaimanapun juga agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan atau harapan prinsipal, karena pada dasarnya dalam pola hubungan kedua pihak tersebut terdapat potensi terjadinya benturan kepentingan. Prinsipal mengharapkan return yang maksimal, sementara agen juga memiliki keinginan untuk memaksimalkan keuntungan untuk dirinya.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen disebut *agency problem*. *Agency problem* ini terjadi karena adanya distribusi informasi yang tidak seimbang yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh adanya kesulitan prinsipal dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh agen. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan permasalahan tersebut, antara lain :

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Hendriksen (2000) menyatakan bahwa penelitian terakhir dalam bidang teori keagenan memfokuskan pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak, dan ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut misalnya, prinsipal mungkin tidak mengetahui preferensi manajer, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan perhitungan. Atas dasar situasi tersebut, maka diperlukan adanya pihak ketiga (auditor) yang berperan melindungi kepentingan prinsipal dengan cara melakukan kontrol terhadap kinerja agen yang telah diberi wewenang oleh prinsipal.

Dalam pelaksanaan *good corporate governance*, komite audit merupakan bagian dari mekanisme monitoring yang dapat meningkatkan kualitas pelaporan eksternal perusahaan. Melalui tugas-tugas dan wewenang yang dimilikinya, komite audit dapat melakukan monitoring pelaporan yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen sebagai pengguna internal tentunya mengetahui lebih banyak tentang keadaan perusahaan dibanding pengguna prinsipal. Situasi ini memicu terjadinya asimetri informasi, dimana ada

ketidakseimbangan perolehan informasi antara manajemen dengan prinsipal. Dengan adanya komite audit, diharapkan dapat mengatasi munculnya asimetri informasi tersebut. Ketika asimetri informasi berkurang, maka *agency cost* yang ditanggung prinsipal pun akan berkurang.

### **2.1.2 Good Corporate Governance**

Saat ini hampir seluruh perusahaan publik melaksanakan prinsip *good corporate governance*. Faktor yang mendorong perusahaan diseluruh belahan dunia untuk menerapkan prinsip ini adalah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berimbas pada hancurnya beberapa perusahaan raksasa di dunia seperti *Enron*. *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dalam Pembayun (2012) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Yang dimaksud dengan nilai tambah adalah kemampuan *good governance* dalam melindungi kepentingan investor.

Menurut KNKG (2012), prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pelaksanaan *good corporate governance* antara lain:

1. Transparansi, yang mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat,

dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat.

2. Akuntabilitas, mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
3. Responsibilitas, mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal serta tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi, mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan bersikap objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perusahaan beserta seluruh jajaran di bawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi objektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Kewajaran dan kesetaraan, mengandung unsur perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, konsumen, dan

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

Setiap perusahaan harus berkomitmen dan konsisten dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* tersebut. Agar pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dapat terwujud, maka diperlukan adanya struktur kepengurusan perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan direksi, dan dewan komisaris. Kepengurusan perusahaan di Indonesia menganut *two tier system*, sehingga dewan direksi dan dewan komisaris mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing. Dewan direksi bertanggung jawab dalam mengelola dan mewakili kepentingan perusahaan sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris membentuk komite. Salah satunya adalah komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa: i) pengendalian internal dilaksanakan dengan baik; ii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku; iii) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen; iv) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; v) calon auditor eksternal, termasuk imbalan jasanya diajukan kepada dewan komisaris berdasarkan kriteria yang wajar (KNKG, 2012).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite audit sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Bahkan di Indonesia, keberadaan komite audit telah dipertegas melalui Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa seluruh perusahaan publik wajib membentuk komite audit.

### **2.1.3 Komite Audit**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, dewan komisaris membentuk suatu komite audit untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Di Indonesia, keberadaan komite audit dalam perusahaan publik telah dipertegas dalam Peraturan Nomor: IX.I.5 (lampiran Kep-29/PM/2004). Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang paling kurang memuat :

- a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang
- b. komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan
- c. tata cara dan prosedur kerja
- d. kebijakan penyelenggaraan rapat
- e. sistem pelaporan kegiatan
- f. ketentuan mengenai penanganan pengaduan/pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.

Kualitas audit sendiri dapat diukur melalui empat proksi, yakni independensi, kompetensi akuntansi/ keuangan, aktivitas dan ukuran komite

audit yang kesemuanya telah tercantum dalam peraturan Nomor: IX.I.5. dimana disebutkan bahwa :

- a. Anggota Komite Audit :
  - Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa attestasi, jasa non-attestasi, dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - Bukan merupakan orang yang bekerja pada Emiten dan Perusahaan Publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan Emiten dan Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
  - Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut, wajib mengalihkan sahamnya kepada pihak lain.

- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau perusahaan Publik Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama atau Perusahaan Publik.
  - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.
  - Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- b. Komite audit paling kurang terdiri dari tiga anggota, dimana sebagian besar anggota komite audit adalah komisaris independen dan anggota lainnya adalah pihak luar emiten dan perusahaan publik.
- c. Anggota komite audit wajib :
- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  - Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- d. Paling kurang satu diantara anggota komite audit memiliki keahlian dibidang akuntansi atau keuangan.

- e. Rapat Komite Audit:
- Komite audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan.
  - Rapat komite audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota.
  - Keputusan rapat komite audit diambil berdasar musyawarah untuk mufakat.
  - Setiap rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

#### **2.1.4. Karakteristik Dewan Komisaris**

Sama halnya dengan karakteristik komite audit, karakteristik dewan komisaris juga diprosikan dengan independensi, keahlian, aktivitas, dan ukuran dewan komisaris.

a. Independensi Dewan Komisaris

Dewan komisaris terdiri dari komisaris yang berasal dari pihak yang tidak terafiliasi yang dikenal sebagai komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi (Indrayati, 2010). Melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, mensyaratkan perusahaan untuk

memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen dari jajaran anggota dewan komisaris. Independensi dewan komisaris diukur dari persentase komisaris independen dari keseluruhan anggota dewan komisaris yang ada di dalamnya. Semakin besar persentase anggota dewan komisaris independen diharapkan akan menghasilkan keputusan yang semakin objektif pula, termasuk keputusan dalam pembentukan komite audit. Semakin tinggi independensi dewan komisaris diharapkan dapat membentuk komite audit yang berkualitas sesuai dengan prinsip *good corporate governance*.

b. Keahlian Dewan Komisaris

Dewan komisaris setidaknya harus memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis, karena latar belakang pendidikan yang dimiliki dewan komisaris akan mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada direksi. Suhardjanto dan Afni (dalam Prawinandi,dkk, 2012) mengemukakan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* dalam *annual report* perusahaan. Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis diharapkan lebih memahami tentang pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

c. Aktivitas Dewan Komisaris

Aktivitas dewan komisaris diukur dari jumlah rapat yang dilaksanakan dalam periode satu tahun. Pada umumnya, dewan komisaris mengadakan pertemuan secara berkala sekali dalam sebulan, triwulanan atau paling sedikit sekali dalam empat bulan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan pertemuan untuk membahas pekerjaan terkait tugas dan tanggung jawab mereka, maka diharapkan bahwa kualitas pengelolaan dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan semakin baik. Sehingga tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *good corporate governance* semakin tinggi.

d. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris menggambarkan jumlah anggota dari dewan komisaris yang bersangkutan. Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002, disebutkan bahwa komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Ukuran dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan, karena akan berpengaruh terhadap efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran dewan komisaris juga harus disesuaikan dengan ukuran dewan direksi. Jumlah anggota dewan komisaris setidaknya harus lebih besar atau minimal sama dengan jumlah anggota dewan direksi, karena apabila jumlah anggota dewan komisaris lebih sedikit dibanding

jumlah anggota dewan direksi, maka akan terdapat kemungkinan anggota dewan komisaris mendapat tekanan psikologis jika ada perbedaan pendapat antara kedua belah pihak (Indrayati, 2010). Jika ukuran dewan komisaris terlalu kecil, mungkin akan membawa dampak terhadap kualitas keputusan yang rendah.

#### **2.1.5. Keberadaan KAP *Big Four***

Auditor merupakan alat bagi perusahaan dalam melaksanakan pengawasan eksternal. Auditor eksternal dapat mempengaruhi sistem pengawasan internal perusahaan dengan membuat rekomendasi *post-audit* pada peningkatan desain dari sistem (Subramaniam, *et al.*, 2009 dalam Dyaksa, 2012).

Auditor KAP *Big Four* dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan yang lebih tinggi kepada kliennya dibandingkan dengan KAP non *Big Four* (Cohen, *et al.*, dalam Subramaniam, *et al.*, 2009). Dengan demikian, keberadaan KAP *Big Four* dapat mempengaruhi dan mendorong perusahaan yang menjadi kliennya untuk bertindak sesuai dengan praktik terbaik.

#### **2.1.6. Kepemilikan Manajerial**

Menurut Jensen dan Meckling (1976), permasalahan agensi antara manajer dan *shareholders* timbul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Itulah alasan adanya perbedaan antara manajer dan *shareholders*. Kepemilikan saham oleh manajer dapat terjadi salah satunya karena adanya pemberian bonus atau kompensasi kepada manajer dalam bentuk saham. Kepemilikan saham oleh manajer dapat meringankan masalah agensi dan juga mengakibatkan keselarasan yang lebih besar pula terhadap kepentingan pemegang

saham. Dengan menjadi pemilik saham, para manajer akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga mereka juga akan mengambil keputusan terbaik untuk perusahaan. Teori agensi memprediksi bahwa meningkatnya kepemilikan manajerial akan menurunkan permintaan monitoring oleh komite audit (Beasley dan Salterio dalam Baxter, 2010).

#### **2.1.7. Ukuran perusahaan**

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur melalui total aset. Total aset dapat menggambarkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan proses operasinya. Semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan maka menggambarkan semakin besar pula ukuran perusahaan (Dyaksa, 2012).

#### **2.1.8. *Leverage***

Menurut Riyanto (dalam Yahya, 2011), *leverage* dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva atau dana, dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap. *Leverage* menggambarkan seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan perusahaan, akibat semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari utang. Semakin tinggi rasio *leverage*, maka semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan (Dyaksa, 2012).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Terdapat banyak penelitian yang terkait dengan keberadaan komite audit. Namun umumnya, penelitian yang telah dilakukan memposisikan komite audit

sebagai variabel independen yang mempengaruhi berbagai variabel dependen, misalnya manajemen laba. Belum banyak penelitian yang dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komite audit itu sendiri.

Baxter (2010) melakukan penelitian terhadap 200 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Australian Securities Exchange (ASX). Penelitian ini menguji apakah faktor-faktor seperti karakteristik dewan direksi (independensi, keahlian, aktivitas, ukuran), *leverage*, keberadaan KAP *Big Five*, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas komite audit. Dalam penelitian ini, kualitas komite audit juga diproksikan dengan independensi, keahlian, aktivitas, dan ukuran komite audit itu sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa independensi, keahlian, dan ukuran dewan direksi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas komite audit, sedangkan *leverage*, keberadaan KAP *Big Five*, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

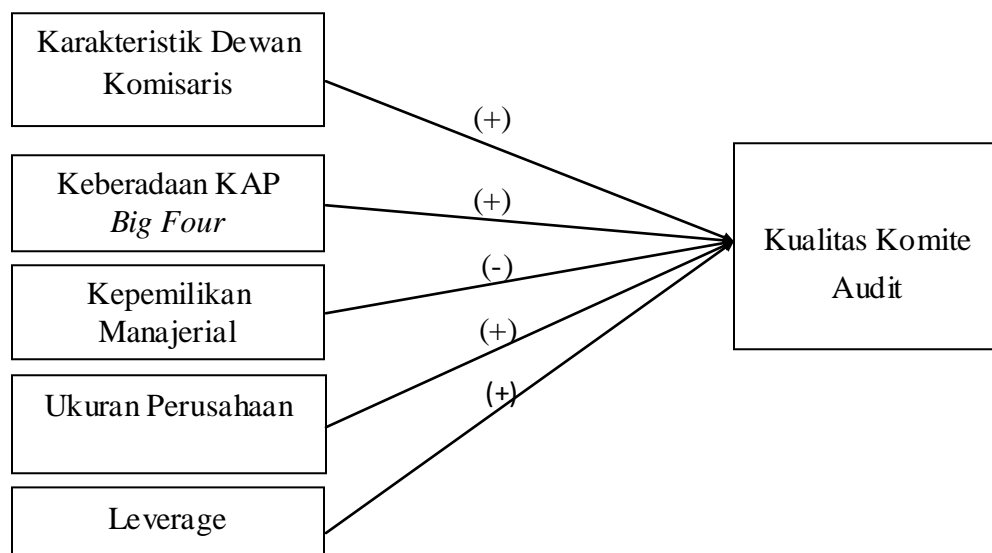
Cotter dan Silvester (dalam Baxter, 2010) menguji faktor-faktor yang berhubungan dengan indikator kualitas komite audit. Secara spesifik, penelitian ini menguji hubungan antara independensi komite audit dan kepemilikan manajerial, pembayaran dividen, *leverage*, dan pemegang saham utama dalam dewan direksi. Selanjutnya, penelitian ini juga menguji hubungan antara independensi komite audit dengan nilai perusahaan. Hasilnya adalah ditemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara independensi komite audit dan independensi dewan direksi. Selain itu, Cotter dan Silvester juga menemukan

bahwa semakin tinggi independensi komite audit akan mengurangi pengawasan oleh *debt-holders* ketika nilai *leverage* rendah.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dilatarbelakangi dari kasus jatuhnya perusahaan besar, penerapan dan pelaksanaan *good corporate governance* kini mendapat perhatian yang lebih dari berbagai pihak terutama pemerintah sebagai regulator. Salah satu wujud nyata pelaksanaan praktik *good corporate governance* adalah dengan dibentuknya komite audit yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan internal perusahaan. Untuk mencapai pelaksanaan *good corporate governance* komite audit yang dibentuk harus memiliki kualitas yang baik pula.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Kualitas komite audit tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik dewan komisaris yang berperan membentuk komite audit tersebut. Karakteristik dewan komisaris tersebut diproksikan dengan independensi, kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis, aktivitas, dan ukuran dewan komisaris. Keberadaan KAP *Big Four*, kepemilikan manajerial, serta ukuran perusahaan juga diprediksi akan mempengaruhi komite audit suatu perusahaan.

## **2.4 Hipotesis**

### **2.4.1. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kualitas Komite Audit**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karakteristik dewan komisaris diproksikan dengan independensi, kompetensi, aktivitas dan ukuran dewan komisaris tersebut. Karakteristik dewan komisaris ini diprediksi dapat berpengaruh terhadap kualitas komite audit mengingat di Indonesia, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris. Jadi, ketika badan yang membentuk komite audit tersebut berkualitas, maka komite audit yang dibentuknya juga akan berkualitas. Beberapa penelitian terdahulu mendukung pendapat tersebut. Klein (2002) menemukan bahwa independensi komite audit meningkat seiring dengan peningkatan ukuran dan independensi dewan direksi. Hasil penelitian Menon dan William (1994) menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit berhubungan dengan proporsi direktur independen. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis:

H1 : Karakteristik dewan komisaris berpengaruh secara positif terhadap kualitas komite audit.

#### **2.4.2. Pengaruh Keberadaan KAP *Big Four* terhadap Kualitas Komite Audit**

Reputasi yang dimiliki oleh auditor eksternal dapat mempengaruhi perilaku auditor tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut De Angelo (dalam Baxter, 2010) semakin besar jumlah klien yang dimiliki oleh auditor, akan dapat menurunkan kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh auditor tersebut, karena mereka juga harus menjaga reputasi dan kepercayaan para kliennya. De Angelo juga menyatakan bahwa semakin kompeten seorang auditor, maka semakin besar pula kemungkinannya dalam menemukan sekaligus melaporkan kecurangan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Cohen, *et al* (2004) yang menyatakan bahwa KAP *Big Four* dipandang dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan yang lebih tinggi kepada kliennya dibandingkan dengan KAP non *Big Four* sehingga, perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan terdorong untuk meningkatkan mekanisme pengawasan internalnya dan bertindak sesuai dengan praktik terbaik, yang salah satunya dapat diwujudkan dengan membentuk komite audit yang berkualitas. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Keberadaan auditor Big Four berpengaruh secara positif terhadap kualitas komite audit.

#### **2.4.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Komite Audit**

Jensen dan Meckling (1976) menegaskan bahwa kenaikan kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer yang memiliki saham dengan pemilik saham lainnya. Kepemilikan manajerial diprediksi dapat meningkatkan semangat manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena

manajer juga berperan sebagai pemilik saham, maka manajer akan bekerja sesuai kepentingan pemegang saham. Jadi, kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh manajer juga akan berkurang. Hal ini juga akan berdampak pada menurunnya asimetri informasi, karena manajer sebagai pemegang saham secara langsung turut serta dalam aktivitas operasional dan pengawasan dalam perusahaan. Sehingga dengan meningkatnya kepemilikan manajerial, maka diprediksi akan menurunkan kebutuhan monitoring oleh komite audit. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap kualitas komite audit.

#### **2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Komite Audit**

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kompleks pula kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar perusahaan tentu saja membutuhkan struktur kepengurusan yang lebih luas dan kompleks. Perusahaan besar juga lebih berpeluang menemui risiko kecurangan, sehingga perusahaan juga membutuhkan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal yang lebih ketat. Keadaan ini menuntut perusahaan untuk memiliki komite audit yang berkualitas untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan internal perusahaan. Dari uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap kualitas komite audit.

#### **2.4.5. Pengaruh *Leverage* terhadap Kualitas Komite Audit**

Menurut Jensen dan Meckling (dalam Baxter, 2010) ketika perusahaan melakukan *debt financing*, maka akan berpotensi menimbulkan konflik antara *shareholders* dan *debtholders* yang meningkatkan biaya agensi. Dalam memperoleh sumber pendanaan dari utang, perusahaan biasanya membuat suatu perjanjian atau kontrak utang. Kontrak utang tersebut berguna untuk mengurangi konflik antara *shareholders* dan *debtholders*. Dalam kontrak utang biasanya perusahaan diminta menyertakan laporan keuangan yang telah di audit (Smith and Warner dikutip dari Baxter, 2010). Manajer dari perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi, semakin memiliki kecenderungan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan perusahaan, sebagai cara untuk menghindari biaya pelanggaran terhadap kontrak utang yang telah disepakati. Keadaan seperti ini tentu saja dapat menurunkan kepercayaan *stakeholders*. Oleh karena itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perusahaan cenderung akan meningkatkan pengawasan dengan membentuk suatu badan yang independen yang dapat menjamin bahwa kegiatan perusahaan sudah sesuai dengan *prinsip good corporate governance*. Seiring dengan meningkatnya rasio *leverage*, perusahaan diprediksi cenderung akan meningkatkan pengawasan dengan membentuk komite audit yang independen dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan guna meyakinkan *stakeholders* bahwa komite audit secara efektif telah melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan (Rainsbury et al., 2008). Dari uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H5 : *Leverage* berpengaruh secara positif terhadap kualitas komite audit.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1. Variabel Dependen**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas komite audit (AC\_QUAL) yang diproksikan dengan indikator-indikator kualitas komite audit antara lain independensi komite audit, keahlian akuntansi dan keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite audit, aktivitas, serta ukuran komite audit. Masing-masing dari keempat indikator tersebut selanjutnya diberi skor *dummy* sesuai dengan kriterianya.

##### a. Independensi Komite Audit

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, independensi setiap anggota ditentukan:

1. Berasal dari luar perusahaan
2. Bukan merupakan orang yang bekerja pada perusahaan dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan serta mengawasi kegiatan perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, komisaris, direksi, atau pemegang saham utama perusahaan.

5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

Menurut Peraturan Nomor IX.I.5 (lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004) bahwa komite audit sedikitnya terdiri dari tiga orang yang sebagian besar adalah anggota independen. Dalam penelitian ini independensi komite audit diketahui melalui persentase anggota komite audit yang independen terhadap keseluruhan jumlah anggota komite audit. Semakin besar persentase anggota komite audit yang independen diprediksi dapat mengarahkan komite audit untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan lebih objektif. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy* dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota komite audit bersifat independen. Sebaliknya, nilai 0 diberikan jika anggota komite audit yang bersifat independen jumlahnya lima puluh persen atau kurang, dari keseluruhan anggota (Baxter, 2010).

b. Kompetensi Komite Audit

Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa paling kurang satu diantara anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi atau keuangan. Komponen penelitian ini dinilai dari latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Anggota komite audit yang dianggap memiliki keahlian di bidang akuntansi dan

keuangan adalah anggota dengan latar belakang pendidikan minimal setingkat sarjana dengan jurusan akuntansi atau keuangan. Dalam penelitian ini latar belakang pendidikan anggota komite audit ditentukan melalui gelar yang dimilikinya. Keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit ini diukur melalui persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki kualifikasi latar belakang pendidikan di atas dari keseluruhan anggota komite audit. Semakin besar persentase anggota komite audit yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian akuntansi atau keuangan diharapkan diprediksi dapat meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota komite audit yang memiliki latar belakang sesuai kualifikasi di atas dan nilai 0 jika lima puluh persen atau kurang dari lima puluh persen (Baxter, 2010).

c. **Aktivitas Komite Audit**

Aktivitas komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang diadakan komite audit dalam kurun waktu satu tahun untuk membahas masalah terkait tugas dan tanggung jawab komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Pada umumnya perusahaan

mengadakan rapat setidaknya empat bulan sekali atau minimal tiga kali dalam setahun. Semakin banyak pertemuan yang diadakan berarti semakin sering pula pihak-pihak dalam perusahaan melakukan koordinasi yang diprediksi dapat meningkatkan kualitas kinerja perusahaan termasuk dalam hal pengawasan. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika komite audit mengadakan rapat lebih dari tiga kali dalam setahun, nilai 0 diberikan jika komite audit hanya menyelenggarakan rapat tiga kali atau kurang dari tiga kali dalam setahun (Baxter, 2010).

d. Ukuran Komite Audit

Berdasarkan keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, komite audit minimal terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dimana sebagian besar anggota komite audit merupakan komisaris independen dan anggota lainnya merupakan pihak luar perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit maka semakin banyak pula sumber informasi dan pengetahuan yang dimiliki sehingga diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang semakin baik dan objektif pula. Sehingga, ukuran komite audit diukur dari jumlah anggota komite audit. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika komite audit beranggotakan lebih dari tiga orang, nilai 0 jika jumlah anggota komite audit sebanyak tiga orang atau kurang (Baxter, 2010).

Sesuai dengan penelitian Baxter (2010), variabel dependen yang berupa kualitas komite audit (AC\_QUAL) dihitung dengan menjumlahkan skor yang diperoleh keempat indikator kualitas audit. Sehingga nilai yang diperoleh berkisar antara 0 hingga 4.

### **3.1.2. Variabel Independen**

#### **3.1.2.1. Karakteristik Dewan Komisaris (BC)**

Karakteristik dewan komisaris diproksikan dengan independensi dewan komisaris, keahlian akuntansi dan keuangan dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. Keempat indikator tersebut selanjutnya diberi skor *dummy* sesuai dengan kriterianya. Berikut penjelasan dari keempat indikator tersebut:

##### **a. Independensi Dewan Komisaris**

Kriteria dari independensi dewan komisaris sama seperti kriteria yang digunakan untuk menentukan independensi komite audit yang ditetapkan oleh keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004. Menurut Wikipedia (2011), komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, dan tidak mewakili pemegang saham. Melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, mensyaratkan perusahaan untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya tiga

puluh persen dari jajaran anggota dewan komisaris. Pengukuran independensi dewan komisaris adalah melalui persentase anggota dewan komisaris yang independen dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari tiga puluh persen anggota dewan komisaris bersifat independen. Sebaliknya, nilai 0 diberikan jika anggota dewan komisaris yang independen jumlahnya hanya tiga puluh persen atau bahkan kurang dari tiga puluh persen.

b. Kompetensi Dewan Komisaris

Variabel ini dinilai dengan melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris yang dianggap memiliki keahlian di bidang ekonomi dan bisnis adalah anggota yang berlatarbelakang pendidikan ekonomi dan bisnis dengan jenjang minimal sarjana. Dalam penelitian ini latar kompetensi dewan komisaris ditentukan melalui gelar yang dimilikinya. Variabel ini dinilai melalui persentase anggota yang minimal memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis (sesuai kualifikasi) dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Pengukurannya, dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika lebih dari lima puluh persen anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis minimal jenjang S1 dan nilai 0, jika anggota dewan

komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis jumlahnya hanya lima puluh persen atau bahkan kurang dari lima puluh persen, dari keseluruhan anggota.

c. Aktivitas Dewan Komisaris

Aktivitas dewan komisaris dinilai dari intensitas pertemuan atau rapat yang diadakan dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga variabel aktivitas dewan komisaris diukur dari jumlah rapat yang diadakan dalam waktu satu tahun. Pengukuran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika dewan komisaris mengadakan rapat lebih dari tiga kali dalam setahun, nilai 0 jika dewan komisaris hanya menyelenggarakan rapat sebanyak tiga kali atau bahkan kurang dari tiga kali dalam setahun.

d. Ukuran Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, dewan komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota atau lebih. Namun, ukuran dewan komisaris hendaknya juga disesuaikan dengan ukuran dewan direksi. Jumlah anggota dewan komisaris hendaknya lebih besar atau setidaknya sama dengan jumlah anggota dewan direksi. Karena, ketika ukuran dewan komisaris lebih kecil dari dewan direksi dikhawatirkan akan mendapat tekanan psikologis ketika melaksanakan tugas pengawasan (Indrayati, 2010). Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah anggota dewan komisaris.

Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana nilai 1 diberikan jika jumlah anggota dewan komisaris sama dengan atau lebih besar dari jumlah dewan direksi dan nilai 0 jika jumlah anggota dewan komisaris lebih kecil dari jumlah anggota dewan direksi.

Variabel dewan komisaris dihitung melalui metode yang sama dengan penghitungan variabel kualitas komite audit, yakni dengan menjumlahkan skor yang diperoleh keempat indikator karakteristik dewan komisaris sehingga nilai yang diperoleh berkisar antara 0 hingga 4.

### **3.1.2.2. Keberadaan KAP *Big Four* (AUDITOR)**

KAP *big four* adalah auditor yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi dibandingkan dengan KAP non *big four*. Sehingga auditor *big four* juga memiliki reputasi yang baik dikalangan masyarakat. Dengan reputasi yang dimiliki, KAP *big four* akan senantiasa berusaha menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dengan melakukan pekerjaannya sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, secara tidak langsung reputasi yang dimiliki oleh KAP *big four* akan dapat mempengaruhi perusahaan kliennya untuk membentuk suatu mekanisme pengawasan internal yang lebih baik dari perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *big four*. Cohen, *et al* (2004) menyebutkan bahwa KAP *big four* dapat meningkatkan kualitas mekanisme pengawasan yang lebih tinggi kepada kliennya dibandingkan dengan KAP non *big four*. Di Indonesia, Kantor Akuntan Publik yang termasuk kelompok *big four* antara lain:

1. KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E&Y)
2. KAP Haryanto Sahari & Co. yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC)
3. KAP Osman Bing Satrio & Co. yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu (DTT)
4. KAP Sidharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)

Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan yang diaudit oleh *big four* diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang diaudit oleh auditor non *big four* diberi nilai 0.

#### **3.1.2.3. Kepemilikan Manajerial (MGOWN)**

Kepemilikan manajerial adalah besarnya saham yang dimiliki oleh manajer. Dalam penelitian ini besarnya kepemilikan manajerial diukur dengan cara menjumlahkan persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan/atau direktur dan komisaris non independen (Baxter, 2010).

#### **3.1.2.4. Ukuran Perusahaan (LNSIZE)**

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan sekaligus kompleksitas kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks pula aktivitas operasi perusahaan. Ukuran perusahaan diproksikan dengan nilai LN ( logaritma natural) dari total aset yang dimiliki perusahaan (Baxter, 2010).

### 3.1.2.5. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aktivitasnya. Dalam penelitian ini leverage dihitung dengan membagi total utang dengan total aset (Baxter, 2010).

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

## 3.2. **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011. Hingga akhir tahun 2011 jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI adalah sebanyak 428 perusahaan, yang terdiri dari 72 perusahaan keuangan dan 356 perusahaan non keuangan.

Dalam penelitian ini penentuan sampel akan dilakukan melalui metode *random sampling*. Dalam penelitian ini, penentuan ukuran sampel dilakukan dengan menggunakan formula Babbie (1983, dalam Rizal, 2001):

$$n = \frac{N \cdot pq}{(N-1) \frac{B^2}{4} + pq}$$

Dimana:

n = jumlah sampel yang diinginkan

N = jumlah populasi

p = probable value = 0,5 (untuk meminimalkan risiko sampling)

q = 1-p = 0,5

B = Bound of error atau kelonggaran kesalahan diperkirakan *berinterval*

*range* tidak lebih dari 10%

$$n = \frac{356 (0,5,0,5)}{355.0,0025 + (0,5,0,5)}$$

$$n = 78,24 = 78 \text{ perusahaan}$$

Perusahaan sektor keuangan dan perbankan tidak dimasukkan sebagai sampel, karena terdapat perbedaan struktur dan karakteristik laporan keuangan antara perusahaan non keuangan dan keuangan.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari Pojok BEI UNDIP. Data tersebut berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 2011
2. Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Indonesia Stock Exchange (IDX)
4. Website perusahaan
5. Sumber lainnya, seperti artikel, buku, dan penelitian terdahulu

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter berupa laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan studi pustaka, dilakukan dengan mengolah literature-literature, artikel, jurnal dan media tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **3.5. Metode Analisis**

#### **3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, varian, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2009). Mean menunjukkan nilai rata-rata dari data yang bersangkutan. Maksimum menunjukkan nilai terbesar, sedangkan minimum menunjukkan nilai terkecil. Standar deviasi memberikan informasi tentang seberapa besar data bervariasi dari rata-rata. Analisis ini sekedar memberikan informasi mengenai data yang tersedia dan tidak digunakan untuk menguji hipotesis.

#### **3.5.2. Uji Asumsi Klasik**

##### **3.5.2.1. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Normalitas dapat diketahui dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam Ghozali (2009) dijelaskan bahwa uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan jika tidak hati-hati secara visual. Sehingga, disamping melihat grafik, uji normalitas juga perlu dilakukan dengan uji statistik. Uji statistik yang digunakan adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan membuat hipotesis :

H<sub>0</sub> : data residual berdistribusi normal

H<sub>a</sub> : data residual tidak berdistribusi normal

Apabila angka probabilitas lebih dari 0,05 maka H<sub>a</sub> ditolak, sehingga variabel ini terdistribusi secara normal.

#### **3.5.2.2. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2009). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance  $\leq 0.001$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ , maka model regresi terdapat multikolonieritas.

#### **3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika terjadi perbedaan variance, maka dalam model tersebut terdapat heteroskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*

antara nilai-nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dengan residual SRESID dan uji glejser (Ghozali, 2009).

### 3.5.3. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda, karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel independen. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara kualitas komite audit dengan variabel-variabel independennya. Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$AC_{k,t} = \alpha_{0t} + b_{0t} BC + b_{1t} AUDITOR + b_{2t} MGOWN + b_{3t} LNSIZE + b_{4t} LEV + \varepsilon_t$$

Dimana :

$\alpha_{0t}$  : konstanta

$AC_{k,t}$  : keseluruhan indikator kualitas komite audit (independensi, keahlian, aktivitas dan ukuran komite audit), berupa penjumlahan dari nilai variabel dummy yang digunakan sebagai pengukuran keempat indikator kualitas komite audit.

$b_{0t} BC$  : karakteristik dewan komisaris yang diukur melalui penjumlahan nilai variabel dummy dari indikator-indikator yang berupa independensi dewan komisaris, keahlian akuntansi dan keuangan dewan komisaris, aktivitas dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris.

$b_{1t}$ AUDITOR	: keberadaan <i>Big Four</i> (variabel <i>dummy</i> :1 untuk <i>Big Four</i> ; 0 untuk non <i>Big Four</i> )
$b_{2t}$ MGOWN	: kepemilikan manajerial, diukur dari persentase ekuitas yang dimiliki oleh manajer
$b_{3t}$ LNSIZE	: ukuran perusahaan, diukur dengan natural log total aset
$b_{4t}$ LEV	: rasio utang terhadap total aset
$\varepsilon_t$	: eror

Langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis model regresi melalui uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji statistik F, dan uji statistik t.

### 3.5.3.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Nilai determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai koefisien determinasi yang mendekati satu menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Kelemahan mendasar dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan nilai Adjusted  $R^2$ .

### 3.5.3.2. Uji Statistik F

Menurut Ghozali (2009), uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersaa-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Pengujian

dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 dimana  $H_0$  yang hendak diuji adalah apakah semua parameter sama dengan nol (semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan) dan hipotesis alternatifnya adalah tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol  $H_A$  sama dengan nol (semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen). Kriteria pengambilan keputusannya :

1.  $H_0$  diterima jika nilai signifikansi  $> 0,05$  dan ditolak jika nilai signifikansi  $< 0,05$ .
2. Bila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima.

### **3.5.3.3. Uji Statistik t**

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 0,05. Uji t dilakukan dengan membandingkan sig t dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Apabila sig  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2009).